



Pendidikan Demokrasi dan Pendidikan Multikultural: Tinjauan Praktis di Sekolah Menengah Pertama

Daffa Fakhri Maulana^{1✉}, Dian Azizah Wijaya², Danang Ade Agustinova³, Suharno⁴

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia^{1,4}

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia²

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia³

e-mail : daffafakhri.2022@student.uny.ac.id¹, dianazizah.2023@student.uny.ac.id²,

danangadeagustinova@uny.ac.id³, suharno@uny.ac.id⁴

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang multikultural dan demokratis. Kondisi tersebut dapat menjadi potensi konflik di dalam masyarakat. Untuk menanggulangi tantangan tersebut, diperlukan strategi khusus, salah satunya melalui sektor pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pendidikan demokrasi dan pendidikan multikultural di SMP Negeri 8 Yogyakarta sebagai salah satu strategi dalam pemecahan masalah mengenai potensi konflik yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Subjek dalam penelitian ini melibatkan peran kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran PPKn, IPS, Seni Budaya, dan agama. Hasil dari penelitian adalah: 1) Pendidikan demokrasi diimplementasikan dalam kegiatan intrakurikuler yakni pembelajaran PPKn melalui metode pembelajaran debat dan kegiatan ekstrakurikuler salah satunya Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) khususnya pada saat kegiatan pemilihan calon ketua OSIS, serta lomba debat. 2) Pendidikan multikultural diimplementasikan melalui berbagai kegiatan diantaranya pembelajaran PPKn, pembelajaran IPS, karnaval Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Yogyakarta, peningkatan iman keagamaan, *field trip* candi prambanan, dan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang mencakup dimensi integrasi materi, dimensi budaya sekolah, dan struktur sekolah yang memberdayakan. Dapat disimpulkan bahwa SMP Negeri 8 Yogyakarta sudah mengimplementasikan pendidikan demokrasi dan pendidikan multikultural dengan sangat baik melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Kata Kunci: Pendidikan Demokrasi, Pendidikan Multikultural, Demokrasi, Multikultural.

Abstract

Indonesia is a multicultural and democratic country. This condition can potentially lead to conflicts within society. To address these challenges, specific strategies are needed, one of which is through the education sector. This study aims to describe the implementation of democracy education and multicultural education at SMP Negeri 8 Yogyakarta as one of the strategies in addressing potential conflicts. The research employs a qualitative method with a case study approach. The subjects involved in this research include the school principal, vice principal, teachers of PPKn, IPS, Arts and Culture, and religion. The findings of the research are as follows: 1) Implementation of Democratic Education: Democratic education is implemented through intracurricular activities, particularly in PPKn lessons using debate as a teaching method. Extracurricular activities such as the OSIS, especially during the election of OSIS chairperson, and debate competitions also contribute to democratic education. 2) Implementation of Multicultural Education: Multicultural education is implemented through various activities, including PPKn and IPS lessons, the Yogyakarta City Anniversary Carnival, religious faith enhancement, field trips to Prambanan Temple, and the Strengthening Student Pancasila Profile Project (P5), which covers the integration of materials, school culture dimension, and empowering school structures. In conclusion, SMP Negeri 8 Yogyakarta has effectively implemented democratic education and multicultural education through intracurricular, extracurricular, and cocurricular activities.

Keywords: Democracy Education, Multicultural Education, Democracy, Multicultural.

Copyright (c) 2024 Daffa Fakhri Maulana, Dian Azizah Wijaya, Danang Ade Agustinova, Suharno

✉ Corresponding author :

Email : daffafakhri.2022@student.uny.ac.id

DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i2.6458>

ISSN 2656-8063 (Media Cetak)

ISSN 2656-8071 (Media Online)

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara yang terdiri dari kepulauan, memiliki populasi sekitar 270 juta penduduk. Terdapat 17.504 pulau di Indonesia, dimana 7.870 pulau telah diberi nama dan 9.634 lainnya belum memiliki nama. Keanekaragaman Indonesia disebabkan oleh pengaruh letak geografisnya yang luas (Suharno, 2016). Keanekaragaman tersebut terdiri dari keragaman, agama, suku, ras, bahasa, gender, dan kelas sosial. Tercatat lebih dari 300 kelompok etnik dengan kebudayaan yang beragam tinggal di Indonesia. Berbagai etnis tersebut menghuni sekitar 13.000 pulau yang tersebar di wilayah Indonesia. Selain itu juga masyarakat yang tinggal di Indonesia juga menganut agama yang berbeda-beda seperti Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, Konghucu dan berbagai aliran kepercayaan lain.

Keragaman adalah seperti pisau bermata dua, di satu sisi dapat memberikan manfaat bagi kita semua, tetapi disisi lain dapat pula menjadi sebuah tantangan. Sebagaimana dijelaskan oleh Agustian,dkk (2023) bahwa keberagaman merupakan anugerah bagi bangsa, namun disatu sisi juga dapat menyebabkan ketegangan dan bahkan konflik sosial yang mengganggu kesatuan dan persatuan bangsa. Salah satu alasan yang memicu konflik sosial ialah kurangnya pemahaman atau toleransi terhadap keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat.

Indonesia, sebagai negara yang beragam dan kaya budaya, memerlukan prinsip-prinsip demokrasi, toleransi, dan persatuan. Namun, pada masa pemerintahan Orde Baru hal-hal tersebut tidak tercermin. Selama tiga dekade pemerintahan Orde Baru yang menerapkan kebijakan sentralistik dan pengawasan yang ketat terhadap perselisihan, hal ini membuat masyarakat tidak lagi dapat secara terbuka, rasional, dan efektif dalam memikirkan, berkomunikasi, serta menyelesaikan masalah yang timbul dari konflik. Kekerasan antar kelompok yang timbul secara sporadis di beberapa wilayah di Indonesia pada akhir 1990-an menunjukkan betapa tidak stabilnya rasa kebersamaan yang dibangun di negara ini, seberapa kuat prasangka antar kelompok, dan seberapa kurangnya pemahaman antar sesama (Arifudin, 2007). Selain berimbas pada multikulturalisme, kebijakan tersebut juga berimbas pada demokratisasi. Hal ini dibuktikan oleh studi Wales (2022) yang menemukan bahwa dalam konflik yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, seperti di Poso seperti di Poso (pertikaian antara penganut agama Kristen dan Muslim), Sampit (konflik antara Suku Madura dan Dayak), di Aceh (antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia), serta bentrokan antar desa di Pulau Jawa dan aksi tawuran antar pelajar dari sekolah berbeda.

Perubahan rezim pemerintahan baru ini sedikit banyaknya berdampak terhadap proses integrasi bangsa Indonesia. Selama masa Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto, pertikaian antarkelompok sering kali diatasi dengan menggunakan kekuatan militer yang terus menerus menerapkan tindakan represif terhadap sumber konflik yang dapat mengancam integritas negara. Namun, setelah Presiden Habibie membuka pintu demokrasi, penanganan konflik antarkelompok tidak lagi menggunakan pendekatan represif militer. (A. M. Wibowo, 2015). Hal tersebut menjadi suatu tahap positif bagi perkembangan multikulturalisme dan demokratisasi di Indonesia.

Namun, dengan perubahan rezim yang terjadi bukan berarti permasalahan tentang keberagaman di Indonesia selesai. Krisis sosial-budaya kerap timbul seiring perubahan zaman yang dipengaruhi oleh arus globalisasi. Pada masa globalisasi saat ini, banyak transformasi yang telah terjadi, termasuk dalam sikap, pemikiran, perilaku, aspek sosial, budaya, politik, dan bahkan dalam segala aspek kehidupan modern. Problem ini sangat umum di berbagai wilayah Indonesia, terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). DIY, yang dikenal sebagai "Kota Pelajar", sangat menarik bagi peserta didik yang ingin belajar di Yogyakarta. Hal ini tercermin dari jumlah mahasiswa dari luar daerah yang datang untuk belajar dan pendatang yang mencari peruntungan di wilayah DIY. Hal ini memungkinkan terjadinya konflik "laten" dan konflik "manifes" karena keanekaragaman sosial masyarakat DIY (Sulistyobudi, dkk, 2014). Kondisi

multikultural sebagaimana diuraikan di atas dapat menimbulkan konflik dan intoleransi terhadap keragaman jika tidak dikelola dengan baik.

Mengingat potensi yang telah diidentifikasi sebelumnya, diperlukan pendekatan khusus dalam menangani tantangan tersebut melalui berbagai sektor, khususnya di bidang pendidikan. Untuk mengatasi berbagai konflik tersebut, Suharno (2016) mengatakan bahwa kita perlu memahami betapa pentingnya multikulturalisme untuk menumbuhkan rasa saling menghormati dan menghargai. Multikulturalisme erat terkait dengan nasionalisme karena merupakan ideologi yang mendukung nasionalisme. Salah satu cara strategis yang dapat digunakan untuk menghasilkan generasi yang mempunyai rasa saling menghormati dan menghargai tersebut, menurut Palipung (2016) adalah dengan menanamkan nilai keberagaman dalam kurikulum multikultural di sekolah. Camelia & Suryandari (2021) menyatakan bahwa melalui pendidikan, pemahaman multikulturalisme dapat mengedukasi masyarakat tentang keragaman sosial, agama, etnis, dan budaya yang menjadi ciri khas Indonesia sebagai sebuah negara.

Seiring dengan peningkatan demokratisasi bangsa, wacana tentang pendidikan multikultural semakin meningkat. Ini berdampak pada penguatan masyarakat sipil dan penghormatan HAM. Sejak gerakan reformasi pada akhir abad ke-20 yang lalu, demokrasi telah menjadi pilihan nasional. Hal ini tidak hanya terlihat dalam partisipasi masyarakat dalam pemilu, kebebasan publik untuk menyuarakan pendapat, ide, dan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjadi ruh kehidupan masyarakat nasional, membangun persatuan di daerah dan negara dalam menghadapi persaingan global (Rosyada, 2014).

"Pendidikan multikultural" adalah istilah yang dapat digunakan baik secara normatif maupun deskriptif untuk menggambarkan masalah dan isu-isu yang berkaitan dengan keberagaman dalam pendidikan. Istilah ini juga mencakup pemahaman tentang bagaimana masyarakat multikultural mempertimbangkan kebijakan pendidikan. Berlandaskan penjelasan tersebut, kurikulum pendidikan multikultural mungkin melibatkan materi seperti toleransi; keragaman agama dan budaya; risiko diskriminasi, termasuk penyelesaian konflik dan mediasi; hak asasi manusia, seperti pluralisme dan demokrasi; serta prinsip kemanusiaan yang universal (Tilaar, 2002).

Pendidikan multikultural adalah gagasan inovatif dalam bidang pendidikan yang menyajikan pemahaman dan solusi untuk mengelola keragaman dalam proses pembelajaran. Temuan Sipuan dkk (2022) menguatkan bahwa pendidikan multikultural menawarkan opsi dengan menerapkan strategi dan prinsip-prinsip pendidikan yang mempertimbangkan berbagai variabel yang beragam dalam masyarakat, terutama di antara peserta didik, seperti keberagaman agama, etnis, bahasa, budaya, status sosial, gender, kemampuan, dan usia.

Untuk menerapkan pendidikan multikultural, kurikulum tidak perlu diubah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memasukkan pendidikan multikultural ke dalam mata pelajaran lainnya. Untuk menerapkannya, guru hanya membutuhkan sebuah pedoman untuk dapat melaksanakan hal tersebut dengan baik. Peserta didik harus diajarkan tentang toleransi, kebersamaan, hak asasi manusia, demokratisasi, dan menghargai satu sama lain. Hal ini merupakan aspek krusial untuk mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan dan sangat penting untuk bekal hidup di masa mendatang. Apabila peserta didik menginternalisasi nilai-nilai kerjasama, toleransi, perdamaian, dan menghargai perbedaan sejak usia dini, maka nilai-nilai tersebut akan tercermin dalam perilaku sehari-hari mereka karena telah menjadi bagian integral dari kepribadian mereka. (Arifudin, 2007).

Selain pendidikan multikultural, pendidikan demokrasi juga merupakan solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut. Pendidikan demokrasi bertujuan mengarahkan peserta didik untuk menjadi lebih matang dalam berdemokrasi dengan cara memperkenalkan nilai-nilai demokrasi, sehingga perilaku mereka mencerminkan prinsip-prinsip demokratis. Dalam pendidikan demokrasi, terdapat penekanan pada dua aspek: demokrasi sebagai konsep dan demokrasi sebagai praktik. Demokrasi sebagai

konsep membahas makna, definisi, dan perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis, sementara demokrasi sebagai praktik mengacu pada implementasi demokrasi sebagai sistem yang nyata. Tugas seorang pendidik adalah menyosialisasikan kedua aspek tersebut, baik konsep maupun praktiknya, sehingga peserta didik memahami dan aktif terlibat dalam kehidupan demokrasi (Sobri & Umar, 2022).

Dengan pendidikan multikultural dan demokrasi, peserta didik dari beragam latar belakang memiliki kesempatan untuk saling mengenal dan memahami budaya, suku, agama, dan tradisi suatu wilayah. Selain itu, peserta didik diberikan pemahaman tentang makna Bhinneka Tunggal Ika dan cara menerapkannya dalam interaksi sosial dengan berbagai komunitas, baik di lingkungan sekolah maupun di luar.

Berdasarkan penelusuran yang teliti melalui studi literatur dari berbagai sumber, telah ada beberapa studi yang meneliti pendidikan demokrasi dan pendidikan multikultural. Meskipun demikian, penelitian ini tetap menarik untuk dibahas karena memiliki aspek kebaruan yang berbeda dari penelitian sebelumnya, adapun beberapa studi yang telah dilakukan sebelumnya mencakup:

1. Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Praktik Pendidikan di Indonesia (Supriatin & Nasution, 2017). Penelitian ini berusaha untuk mengulas konsep pendidikan multikultural dan implementasinya dalam konteks pendidikan di Indonesia.
2. Pendidikan Multikultural dalam Dunia Pendidikan di Indonesia (Furqon, 2020). Penelitian ini berusaha untuk mengindikasikan bahwa pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia bisa dilakukan dengan fleksibilitas, tidak terbatas pada pembelajaran terpisah atau pendekatan monolitik.
3. Implementasi Pendidikan Demokrasi di Sekolah (Sobri & Umar, 2022). Penelitian ini berusaha untuk mengulas tentang praktik pendidikan demokrasi di sekolah.

Berdasarkan tinjauan penelitian sebelumnya yang telah diuraikan diatas, penelitian yang diselidiki oleh peneliti memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya belum ada yang berupaya menyelidiki pendidikan demokrasi dan multikultural secara bersamaan. Padahal keduanya memiliki irisan yang berkaitan dan saling mempengaruhi. Selain itu, penelitian ini juga secara khusus menetapkan lokus penelitian pada sebuah Sekolah Menengah Pertama di Yogyakarta, yaitu SMP Negeri 8 Yogyakarta, yang sebelumnya belum pernah diselidiki. SMP Negeri 8 Yogyakarta ditetapkan sebagai lokus penelitian karena memiliki peserta didik dengan latar belakang yang beragam dan berlokasi di wilayah DIY, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa di wilayah ini berpotensi terjadi konflik karena keanekaragaman sosial masyarakatnya. Oleh karena itu, dengan adanya potensi tersebut, penelitian ini berupaya untuk menyelidiki “Apakah pendidikan demokrasi dan pendidikan multikultural telah diterapkan di sekolah ini demi mencegah terjadinya potensi tersebut?”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik pendidikan demokrasi dan pendidikan multikultural di SMP Negeri 8 Yogyakarta.

METODE

Studi ini menggunakan metode kualitatif dalam bentuk studi kasus. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 8 Yogyakarta pada bulan Juni 2023 - Agustus 2023. Subjek penelitian dipilih berdasarkan kriteria tertentu (*purposive sampling*) dengan mempertimbangkan relevansi dan keperluan penelitian. Subjek penelitian ini melibatkan semua pihak yang terlibat dalam penerapan pendidikan demokrasi dan multikultural, termasuk kepala sekolah SMP Negeri 8 Yogyakarta, wakil kepala sekolah, guru PPKn, guru IPS, guru seni budaya, dan guru agama. Untuk mengumpulkan data dilakukan wawancara terhadap subjek penelitian yang sudah ditentukan, setelah itu dilakukan observasi kepada subjek terkait untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Dokumentasi juga dilakukan untuk mendukung validitas data yang telah didapatkan. Hasil yang berhasil dikumpulkan kemudian divalidasi melalui triangulasi teknik untuk memastikan bahwa data tersebut asli. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini mengikuti prinsip-prinsip interaktif yang telah

dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) melibatkan tiga tahap utama, yaitu kondensasi data, menyajikan data, dan menggambar dan memverifikasi kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pendidikan Demokrasi di SMP Negeri 8 Yogyakarta

Pendidikan demokrasi adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan demokratis. Upaya ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal. Seperti yang disampaikan oleh Winataputra & Budimansyah (2012) bahwa pendidikan demokrasi dalam berbagai konteks, seperti pendidikan formal, non formal, dan informal, memiliki tujuan untuk menjadi wadah penting dalam membangun cita-cita, nilai-nilai, konsep, prinsip, sikap, dan keterampilan demokrasi dalam diri warga negara melalui pengalaman hidup dan kehidupan demokrasi dalam berbagai situasi. Secara lebih sederhana, pendidikan demokrasi secara substantif mengacu pada sosialisasi, penyebaran, aktualisasi, dan pelaksanaan demokrasi melalui pendidikan (Azra, 2002).

Implementasi pendidikan multikultural di SMP Negeri 8 Yogyakarta dirumuskan atas berbagai dimensi melalui kegiatan-kegiatan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, diantaranya:

1. Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Menurut Widiyanto & Istiqomah (2023) mata Pelajaran PPKn merupakan sarana pendidikan demokrasi yang mengajarkan peserta didik untuk berpikir secara kritis dan bertindak secara demokratis. Ini merupakan salah satu strategi untuk menanamkan dan memperkuat nilai-nilai demokrasi dalam struktur pendidikan formal. Hal ini dapat dicapai melalui sebuah tindakan yaitu dengan memberi tahu generasi berikutnya bahwa demokrasi adalah cara hidup yang paling efektif untuk melindungi hak-hak warga. Sebagaimana dinyatakan oleh Muchtar (2001) bahwa, berdasarkan etimologinya, mata pelajaran PPKn dapat dikembangkan secara strategis sebagai pendidikan demokrasi. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa etimologinya mencakup pembentukan nilai dan kesadaran tentang pentingnya menegakkan negara hukum. Tujuan utama pendidikan demokrasi adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang demokrasi dan meningkatkan pemahaman mereka tentang mekanisme seperti keamanan, transparansi, dan tanggung jawab demokratis.



Gambar 1. Debat dalam mata pelajaran PPKn SMP Negeri 8 Yogyakarta

Dengan demikian, jelas bahwa kegiatan intrakurikuler, khususnya mata pelajaran PPKn, adalah salah satu cara untuk menanamkan dan mengembangkan demokrasi dalam sistem pendidikan formal. Hal tersebut juga dilakukan di berbagai sekolah, tak terkecuali di SMP Negeri 8 Yogyakarta. Pendidikan demokrasi diimplementasikan dalam proses belajar mengajar mata pelajaran PPKn dengan sangat baik di SMP Negeri 8 Yogyakarta, salah satunya dengan metode pembelajaran debat. Implementasi model pembelajaran tersebut dilakukan pada berbagai materi dalam mata pelajaran PPKn dari kelas 7-9. Peserta didik biasanya ditugaskan untuk berdebat mengenai suatu topik tertentu yang aktual. Berdasarkan pandangan Zamroni dalam Winarno (2007) maka dapat dipahami bahwa kegiatan belajar mengajar mata pelajaran PPKn dengan metode pembelajaran debat memiliki nilai-nilai demokrasi diantaranya kebebasan

mengemukakan pendapat, menghormati perbedaan pendapat, terbuka dan komunikasi, percaya diri, dan saling menghargai.

2. Kegiatan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)

Selain diimplementasikan melalui kegiatan intrakurikuler, pendidikan multikultural juga dapat diimplementasikan melalui kegiatan ekstrakurikuler. SMP Negeri 8 Yogyakarta mengimplementasikan hal tersebut melalui berbagai macam ekstrakurikuler salah satunya dalam kegiatan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Menurut Agustin & Dewi (2021), kegiatan OSIS di sekolah memiliki nilai-nilai demokrasi. Pendidikan demokrasi dapat terlihat sangat konkrit pada saat kegiatan pemilihan calon ketua OSIS. Kegiatan pemilihan calon ketua OSIS diadakan setiap tahun melalui beberapa tahap diantaranya pendaftaran, wawancara, orasi, pemilihan, dan pelantikan.



Gambar 2. Pemilihan Calon Ketua OSIS SMP Negeri 8 Yogyakarta

Kegiatan pemilihan calon ketua OSIS dapat dikatakan sebagai pendidikan demokrasi karena pada dasarnya salah satu unsur dalam demokrasi adalah pemilihan umum. Pemilihan calon ketua OSIS dapat dimaknai sebagai pemilihan umum dalam lingkup sekolah. Berdasarkan pandangan Zamroni dalam Winarno (2007) maka dapat dipahami bahwa kegiatan pemilihan calon ketua OSIS di SMP Negeri 8 Yogyakarta memiliki nilai-nilai demokrasi diantaranya kebebasan mengemukakan pendapat, menghormati perbedaan pendapat, terbuka dan komunikasi, percaya diri, dan saling menghargai.

3. Lomba Debat

Pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) SMP Negeri 8 Yogyakarta Ke-63 tanggal 1 Agustus 2023, terdapat lomba debat sebagai implementasi pendidikan demokrasi. SMP Negeri 8 Yogyakarta menyelenggarakan lomba debat dengan melibatkan perwakilan peserta didik dari setiap kelas dan guru sebagai juri. Pada awalnya yakni babak penyisihan, peserta didik yang menjadi perwakilan kelas untuk berdebat ditugaskan untuk membuat artikel, kemudian 10 perwakilan kelas yang membuat artikel terbaik melaju ke babak 10 besar. Pada babak tersebut, lomba debat dilaksanakan dengan sistem *Asian Parliamentary* untuk membahas topik tertentu yang aktual.



Gambar 3. Lomba Debat

Kegiatan lomba debat dapat dianggap sebagai pendidikan demokrasi karena dapat menanamkan pemahaman, perspektif, dan keterampilan demokratis. Argumen tersebut didukung oleh penelitian yang

dilakukan oleh Asmaroini & Utami (2017) yang menyatakan bahwa debat merupakan salah satu praktik pendidikan demokrasi di sekolah. Berdasarkan pandangan Zamroni dalam Winarno (2007) maka dapat dipahami bahwa kegiatan lomba debat dalam rangka memperingati HUT SMP Negeri 8 Yogyakarta ke-63 memiliki nilai-nilai demokrasi diantaranya kebebasan mengemukakan pendapat, menghormati perbedaan pendapat, terbuka dan komunikasi, percaya diri, dan saling menghargai.

Implementasi Pendidikan Multikultural di SMP Negeri 8 Yogyakarta

Menurut Suharno (2016) Pendidikan multikultural didasarkan pada perbedaan, sehingga harapannya adalah peserta didik akan belajar bahwa perbedaan yang besar tidak akan menghilangkan rasa nasionalisme, kebersamaan, dan kebangsaan. Sedangkan menurut studi Banks & Banks (2019) pendidikan multikultural didefinisikan sebagai suatu gagasan atau pandangan yang mencakup serangkaian prinsip dan interpretasi yang mengakui serta menghargai nilai keragaman budaya dan etnis dalam membentuk cara hidup, pengalaman sosial, identitas individu, serta peluang pendidikan bagi individu, kelompok, dan bangsa. Nurhidayah, dkk (2022) menegaskan bahwa tujuan pendidikan multikultural tidak terbatas pada memperkenalkan keragaman, tetapi juga bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada setiap peserta didik.

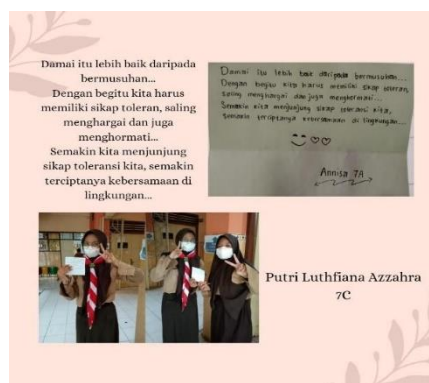
Dari penjelasan para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan multikultural adalah bahwa pendidikan yang berakar pada pengakuan dan penghargaan terhadap perbedaan. Pendidikan multikultural dapat terintegrasi dalam bidang lain, seperti pendidikan kewarganegaraan, ilmu pengetahuan sosial, agama, seni budaya. Danoebroto (2012) mengungkapkan bahwa implementasi pendidikan multikultural tidak perlu dilakukan secara terpisah tetapi dapat disatukan dengan mata pelajaran lain. Secara spesifik Banks (2016) mengatakan bahwa pendidikan multikultural terdiri dari lima komponen yaitu, pengurangan prasangka, kesetaraan pendidikan, integrasi konten proses penyusunan pengetahuan, dan struktur dan budaya sekolah yang memberdayakan. Selanjutnya, Doll (1974) mengungkapkan pendidikan multikultural juga memiliki nilai-nilai yang dapat dikembangkan di sekolah, diantaranya nilai inklusif (terbuka), nilai mendahulukan dialog (aktif), nilai kemanusiaan (humanis), nilai toleransi, nilai tolong menolong, nilai keadilan (demokratis), nilai persamaan dan persaudaraan

Implementasi pendidikan multikultural di SMP Negeri 8 Yogyakarta dirancang dengan mempertimbangkan berbagai aspek melalui kegiatan-kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, diantaranya:

1. Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Menurut Wibowo & Wahono (2017) lingkup materi atau ruang lingkup keilmuan PPKn terdiri dari pancasila, UUD 1945, demokrasi, nilai, etika, moral, politik, hukum, kebudayaan, kearifan lokal, dan kemajemukan bangsa. Nanggala (2020) memperkuat pendapat bahwa PPKn memiliki relevansi yang signifikan sebagai pendidikan multikultural karena tujuan dan kerangka ilmu pengetahuannya secara jelas menekankan perlunya menjaga keragaman dan multikulturalisme di dalam bangsa, serta mengurangi perilaku yang dapat menimbulkan ketidakadilan, kekerasan, konflik antar kelompok, penindasan, dan diskriminasi.

Berdasarkan hal tersebut, SMP Negeri 8 Yogyakarta mengimplementasikan pendidikan multikultural melalui kegiatan belajar mengajar PPKn khususnya kelas VII karena pada dasarnya menurut Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 008/H/Kr/2022 Tentang Capaian Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah, (2022) terdapat Capaian Pembelajaran (CP) Kurikulum Merdeka yang mencakup isu-isu yang berkaitan dengan multikulturalisme.



Gambar 4. Surat Damai sebagai Project Based PPKn SMP Negeri 8 Yogyakarta

Untuk mencapai CP tersebut, guru PPKn mengimplementasikan pendidikan multikultural melalui kegiatan belajar mengajar dengan model pembelajaran *Project Based Learning*. Peserta didik diminta untuk membuat surat damai yang syarat akan makna keberagaman. Implementasi pendidikan multikultural tersebut termasuk ke dalam dimensi integrasi konten sebagaimana yang diungkapkan oleh Banks (2016). Sebagaimana dijelaskan oleh Doll (1974), nilai-nilai pendidikan multikultural digunakan dalam kegiatan proyek surat damai dalam pendidikan Pancasila. Nilai-nilai ini termasuk nilai inklusif (terbuka), nilai kemanusiaan (humanis), nilai toleransi, nilai tolong menolong, nilai keadilan (demokratis), dan nilai persamaan dan persaudaraan.

2. Kegiatan Belajar Mengajar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Selain PPKn yang pada pembahasan sebelumnya telah diuraikan, IPS juga mempunyai peranan penting dalam implementasi pendidikan multikultural karena pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) memiliki keterkaitan dalam penerapan pendidikan multikultural, meskipun sebenarnya pendidikan multikultural dapat diterapkan di seluruh mata pelajaran. Tujuan IPS adalah untuk mengajarkan peserta didik menjadi warga negara yang baik yang memiliki sikap, keterampilan, dan nilai yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan, berpartisipasi dalam masyarakat, dan memecahkan masalah sosial dan pribadi (Sapriya, 2009).



Gambar 5. Project Based Learning IPS SMP Negeri 8 Yogyakarta

Berdasarkan hal tersebut, SMP Negeri 8 Yogyakarta mengimplementasikan pendidikan multikultural melalui kegiatan belajar mengajar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) khususnya kelas VII dan VIII melalui materi pluralitas masyarakat Indonesia. Pendidikan multikultural melalui kegiatan belajar mengajar IPS diimplementasikan melalui model pembelajaran *Project Based Learning*. Peserta didik diberikan tema yakni “Merawat Keberagaman Indonesia” dengan fokus pluralitas agama, pluralitas suku bangsa,

pluralitas bahasa, pluralitas pakaian adat, pluralitas senjata tradisional, pluralitas lagu daerah, pluralitas rumah adat, pluralitas pakaian daerah. Adapun bentuk projeknya berupa *short movie* sederhana (kampanye toleransi), podcast (opini), maket mini, cover lagu daerah, memainkan alat music daerah, lukisan, poster, infografis, menari tarian daerah, serta komik. Projek ini bertujuan agar peserta didik mampu memahami dan memaknai keberagaman melalui aksi nyata.

Pendidikan multikultural melalui kegiatan belajar mengajar IPS diimplementasikan melalui model pembelajaran *Project Based Learning*. Peserta didik diharapkan dapat membuat projek dalam bentuk yang beragam yang syarat akan makna keberagaman. Implementasi pendidikan multikultural tersebut termasuk ke dalam dimensi integrasi konten sebagaimana yang diungkapkan oleh Banks (2016). Sebagaimana dijelaskan oleh Doll (1974), nilai-nilai pendidikan multikultural digunakan dalam kegiatan projek ini. Nilai-nilai ini termasuk nilai inklusif (terbuka), nilai kemanusiaan (humanis), nilai toleransi, nilai tolong menolong, nilai keadilan (demokratis), dan nilai persamaan dan persaudaraan.

3. Karnaval Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Yogyakarta

Al Hakim & Utari (2018) berpendapat bahwa, pendidikan multikultural adalah kebijakan sosial yang berpusat pada pelestarian budaya dan rasa hormat antar kelompok budaya dalam masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, Kota Yogyakarta yang merupakan ibu kota DIY yang dikenal sebagai kota budaya, setiap tahunnya memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) pada tanggal 7 Oktober.



Gambar 6. Karnaval SMP Negeri 8 Yogyakarta

Kegiatan peringatan HUT Kota Yogyakarta setiap tahun diselenggarakan dengan melibatkan berbagai masyarakat, salah satunya instansi pendidikan. Semua sekolah di Kota Yogyakarta, baik negeri maupun swasta, mengadakan karnaval untuk ikut merayakan HUT Kota Yogyakarta. Begitu pula dengan SMP Negeri 8 Yogyakarta juga melaksanakan kegiatan karnaval tersebut, dengan peserta seluruh peserta didik, guru, dan sebagian orang tua. Masing-masing kelas membawakan penampilan berdasarkan tema yang mereka pilih sendiri. Pakaian pejuang, tokoh wayang, dan surjan adalah tema pakaian Jawa yang digunakan oleh beberapa orang. Selain itu, beragam profesi seperti tenaga medis, advokat, petani, insinyur, koki, dan seniman lukis, yang diiringi oleh berbagai jenis musik mulai dari drumband hingga gamelan.

Berdasarkan hal tersebut, pendidikan multikultural diimplementasikan melalui karnaval dalam memperingati HUT Kota Yogyakarta. Seluruh warga sekolah diminta menyemarakkan karnaval mengenakan kostum bertema Jawa, seperti surjan, kebaya, pakaian tokoh pejuang, dan wayang. Dengan kegiatan ini, peserta didik yang tinggal di Kota Yogyakarta akan lebih mengenal budayanya, dan peserta didik yang tinggal di luar kota akan lebih mengenal budaya Yogyakarta. Sebagaimana diungkapkan oleh Banks (2016) dimensi budaya sekolah dan struktur sekolah yang memberdayakan adalah komponen dari implementasi pendidikan multikultural tersebut. Kegiatan karnaval dalam memperingati HUT Kota Yogyakarta oleh SMP Negeri 8 Yogyakarta memiliki nilai-nilai pendidikan multikultural sebagaimana

diungkapkan oleh Doll (1974) diantaranya nilai inklusif (terbuka), nilai kemanusiaan, nilai toleransi, serta nilai persamaan dan persaudaraan.

4. Peningkatan Iman Keagamaan

Menurut Sunarto (2004) definisi pendidikan multikultural adalah mengajarkan keragaman budaya kepada orang lain, memberikan contoh untuk keragaman budaya dalam masyarakat, atau mendorong peserta didik untuk menghargai keragaman budaya masyarakat. Sedangkan menurut Yaqin (2007) pendidikan multikultural adalah metode yang dapat diterapkan di seluruh mata pelajaran dengan mempergunakan keragaman yang terdapat di lingkungan sekolah, termasuk perbedaan agama, ras, budaya, bahasa, gender, dan kelas sosial, untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Tujuan dari pendidikan multikultural adalah untuk mengajarkan peserta didik untuk menjadi demokratis, humanis, dan pragmatis. Dengan demikian, pendidikan multikultural tidak hanya dapat dilaksanakan pada basis budaya, namun juga dapat dilaksanakan pada basis agama.



Gambar 7. Peningkatan Iman Keagamaan SMP Negeri 8 Yogyakarta

Berdasarkan hal tersebut, SMP Negeri 8 Yogyakarta mengimplementasikan pendidikan multikultural melalui kegiatan peningkatan iman keagamaan. Kegiatan tersebut merupakan program yang ditetapkan oleh SMP Negeri 8 Yogyakarta sejak dulu yang mana kegiatan tersebut merupakan proyek mata pelajaran agama, sampai saat ini kegiatan tersebut menjadi budaya sekolah yang diadakan setiap tahun. Peningkatan iman keagamaan dilakukan oleh peserta didik khususnya kelas IX. Menariknya, kegiatan tersebut tidak hanya mengakomodasi salah satu agama, melainkan seluruh agama yang dianut oleh peserta didik SMP Negeri 8 Yogyakarta diantaranya Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu. Adapun kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keimanan peserta didik.

Pelaksanaannya dilakukan setiap tahun di berbagai tempat, untuk agama Islam dilaksanakan di Pantai Bantul dengan kegiatan manasik haji diikuti oleh 250 peserta didik, untuk agama Kristen dan Katolik dilaksanakan pada tempat yang sama yakni di Gereja Ganjuran Bantul dengan kegiatan kebaktian bersama diikuti oleh 65 peserta didik, sedangkan untuk agama Hindu dilaksanakan di Pura Karanggede dan Pura Beji dengan kegiatan Dharma Yatra & Tirta Yatra diikuti oleh 1 peserta didik. Setelah itu, kegiatan tidak hanya berhenti sampai disitu, peserta didik diminta untuk membuat proyek dalam bentuk poster, infografis, banner, dan lain-lain berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut, pendidikan multikultural diimplementasikan melalui peningkatan iman keagamaan. Peserta didik khususnya kelas IX difasilitasi untuk melakukan kegiatan keagamaan. Hal tersebut tentu merupakan bentuk pendidikan multikultural yang dilakukan oleh SMP Negeri 8 Yogyakarta karena dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan iman keagamaan yang dianut oleh seluruh peserta didik. Sebagaimana diungkapkan oleh Banks (2016), dimensi budaya sekolah dan struktur sekolah yang memberdayakan adalah komponen dari implementasi pendidikan multikultural tersebut. Kegiatan peningkatan iman keagamaan memiliki nilai-nilai pendidikan multikultural

sebagaimana diungkapkan oleh Doll (1974) diantaranya nilai inklusif (terbuka), nilai kemanusiaan, nilai toleransi, serta nilai persamaan dan persaudaraan.

5. *Field Trip* Candi Prambanan

Menurut Al Hakim & Utari (2018), pendidikan multikultural adalah kebijakan sosial yang berpusat pada penghormatan dan pelestarian budaya setiap kelompok dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, SMP Negeri 8 Yogyakarta mengimplementasikan pendidikan multikultural melalui kegiatan *field trip* ke Candi Prambanan. Kegiatan tersebut merupakan program yang ditetapkan oleh SMP Negeri 8 Yogyakarta sejak dulu yang mana kegiatan tersebut merupakan proyek lintas mata pelajaran diantaranya Ilmu Pegetahuan Sosial, Seni Budaya, dan Bahasa Indonesia, sampai saat ini kegiatan tersebut menjadi budaya sekolah yang diadakan setiap tahun.



Gambar 8. *Field Trip* Candi Prambanan SMP Negeri 8 Yogyakarta

Field trip ke prambanan dilakukan oleh peserta didik khususnya kelas VIII. Adapun kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan sejarah dan budaya Jawa. Pelaksanaannya dilakukan saat pulang sekolah, kemudian peserta didik kelas VIII beserta guru pendamping menuju ke Candi Prambanan untuk melihat dan mengamati seluruh candi yang ada di kawasan tersebut. Kegiatan diakhiri dengan menonton pertunjukan Ramayana sampai malam hari. Namun, kegiatan tidak hanya berhenti sampai disitu, peserta didik diminta untuk membuat proyek dalam bentuk poster, infografis, banner, dan lain-lain berdasarkan pengamatan di Candi Prambanan.

Berdasarkan hal tersebut, pendidikan multikultural diimplementasikan melalui *field trip* Candi Prambanan. Peserta didik khususnya kelas VIII difasilitasi untuk melihat dan mengamati seluruh candi yang ada di kawasan tersebut serta menonton pertunjukan Ramayana. Hal tersebut tentu merupakan bentuk pendidikan multikultural yang dilakukan oleh SMP Negeri 8 Yogyakarta karena dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan sejarah dan budaya Jawa. Sehingga dengan adanya kegiatan tersebut, peserta didik yang berasal dari Jawa dalam mengenal lebih dalam budayanya sedangkan peserta didik yang berasal dari luar daerah dapat mengenal budaya Jawa. Implementasi pendidikan multikultural tersebut termasuk ke dalam dimensi budaya sekolah dan struktur sekolah yang memberdayakan sebagaimana yang diungkapkan oleh Banks (2016). Kegiatan *field trip* Candi Prambanan memiliki nilai-nilai pendidikan multikultural sebagaimana diungkapkan oleh Doll (1974) diantaranya nilai inklusif (terbuka), nilai kemanusiaan, nilai toleransi, serta nilai persamaan dan persaudaraan.

6. *Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila* (P5)

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, (2022). *Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila* (P5) adalah program yang menekankan pada proyek-proyek yang terpisah dari intrakurikuler, dimaksudkan untuk memperkuat usaha mencapai kemampuan dan kepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila. P5 dibuat berbeda dari intrakurikuler dan dapat

dilaksanakan dengan fleksibel dalam hal muatan, kegiatan, dan waktu. Lembaga pendidikan dapat melibatkan masyarakat dan dunia kerja untuk merencanakan dan menerapkan program untuk meningkatkan keberhasilan P5.



Gambar 9. P5 “Pembuatan Batik Khas Yogyakarta” SMP Negeri 8 Yogyakarta

P5 dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengimplementasikan pendidikan multikultural. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Sutisnawati, dkk (2023) yang menyatakan bahwa pendidikan multikultural dapat diterapkan melalui kegiatan P5. Hal tersebut dibuktikan dengan apa yang dilakukan oleh SMP Negeri 8 Yogyakarta yakni mengimplementasikan P5 “Pembuatan Batik Khas Yogyakarta”. Kegiatan tersebut merupakan program yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 8 Yogyakarta untuk menjalankan program pemerintah yakni P5. P5 “Pembuatan Batik Khas Yogyakarta” dilakukan oleh peserta didik khususnya kelas VII. Adapun kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan budaya khususnya batik khas Yogyakarta. Pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2022 dengan rangkaian kegiatan yakni mendengarkan teori pembuatan batik dan pengenalan batik khas Yogyakarta, pembuatan batik, serta presentasi hasil karya.



Gambar 10. P5 “Pembuatan Makanan/Minuman Khas Daerah” SMP Negeri 8 Yogyakarta

Selain itu, SMP Negeri 8 Yogyakarta juga mengimplementasikan P5 “Pembuatan Makanan/Minuman Khas Daerah”. Kegiatan tersebut merupakan program yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 8 Yogyakarta untuk menjalankan program pemerintah yakni P5. P5 “Memasak Makanan/Minuman Khas Daerah” dilakukan oleh peserta didik khususnya kelas VII. Adapun kegiatan tersebut bertujuan untuk keragaman mengenai makanan dan minuman khas daerah. Pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 18 November 2022 dengan rangkaian kegiatan yakni mendengarkan teori pembuatan dan pengenalan makanan dan minuman khas daerah, pembuatan makanan dan minuman khas daerah, serta presentasi hasil karya.

Peserta didik khususnya kelas VII difasilitasi untuk membuat proyek. Hal tersebut tentu merupakan bentuk pendidikan multikultural yang dilakukan oleh SMP Negeri 8 Yogyakarta karena dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan budaya serta keberagaman yang dimiliki masing-masing daerah. Sehingga dengan adanya kegiatan tersebut, peserta didik dapat mendalami keberagaman yang dimiliki

masing-masing daerah. Sebagaimana diungkapkan oleh Banks (2016), dimensi budaya sekolah dan struktur sekolah yang memberdayakan adalah komponen dari implementasi pendidikan multikultural tersebut. Menurut Doll (1974) nilai-nilai pendidikan multikultural yang ditanamkan dalam kegiatan P5, termasuk nilai inklusif (terbuka), nilai kemanusiaan, nilai toleransi, nilai bantuan, nilai keadilan (demokratis), dan nilai persamaan dan persaudaraan.

SIMPULAN

SMP Negeri 8 Yogyakarta mengimplementasikan pendidikan demokrasi dan pendidikan multikultural dengan sangat baik. Pendidikan demokrasi diimplementasikan dalam proses belajar mengajar mata pelajaran PPKn melalui metode pembelajaran debat. Selain itu, pendidikan demokrasi diimplementasikan melalui berbagai macam ekstrakurikuler salah satunya Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Pendidikan demokrasi dapat terlihat sangat konkrit pada saat kegiatan pemilihan calon ketua OSIS. Kegiatan pemilihan calon ketua OSIS diadakan setiap tahun melalui beberapa tahap diantaranya pendaftaran, wawancara, orasi, pemilihan, dan pelantikan. Pendidikan demokrasi juga diimplementasikan melalui lomba debat. Di antara nilai-nilai demokrasi yang diimplementasikan adalah kebebasan untuk mengemukakan pendapat, menghormati perbedaan pendapat, komunikasi terbuka dan terbuka, percaya diri, dan menghargai satu sama lain. Sedangkan, untuk pendidikan multikultural, SMP Negeri 8 Yogyakarta mengimplementasikannya melalui 2 dimensi yakni dimensi integrasi materi serta dimensi budaya sekolah dan struktur sekolah yang memberdayakan. Hal tersebut diimplementasikan melalui berbagai kegiatan diantaranya 1) Kegiatan Belajar Mengajar PPKn, 2) Kegiatan Belajar Mengajar IPS, 3) Karnaval Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Yogyakarta, 4) Peningkatan Iman Keagamaan, 5) Field Trip Candi Prambanan, dan 6) Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh SMP Negeri 8 Yogyakarta tersebut memiliki nilai-nilai pendidikan multikultural diantaranya nilai inklusif (terbuka), nilai kemanusiaan, nilai toleransi, nilai tolong menolong, nilai keadilan (demokratis), serta nilai persamaan dan persaudaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, M., Wibawa, D. ., Tampubolon, L. ., Lubuk, F. ., & Fortuna, V. D. . (2023). *Meningkatkan Kompetensi Guru Di Lingkungan Forum Guru Agama Nasional Program Studi Pendidikan Sekolah Dasar*, Universitas Katolik Masyarakat Indonesia Dikenal. 12(1), 134–141.
- Agustin, S., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Demokrasi Pada Siswa Kelas Viii Smp Negeri 1 Situraja. *Journal On Education*, 3(3), 223–229. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i2.6458>.
- Al Hakim, S., & Utari, S. (2018). *Pendidikan Multikultural; Strategi Inovatif Pembelajaran Dalam Pluralitas Masyarakat Indonesia*. Madani Media.
- Arifudin, I. (2007). Urgensi Implementasi Pendidikan Multikultural Di Sekolah. *Insania*, 12(2), 220–233. <https://doi.org/10.24090/insania.v12i2.252>.
- Asmaroini, A. P., & Utami, P. S. (2017). Pelaksanaan Pendidikan Demokrasi Siswa Sma Di Kabupaten Ponorogo. *Jppkn*, 2(2), 79–84. <https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/jppkn/article/view/138>.
- Azra, A. (2002). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi Dan Demokratisasi*. Pt. Kompas Media Nusantara.
- Banks, J.A. (2016). *Cultural Diversity And Education Foundations, Curriculum, And Teaching*. Routledge.
- Banks, J.A., & Banks, C. A. M. (2019). *Multicultural Education: Issues And Perspectives*. Wiley.
- Camelia, A., & Suryandari, N. (2021). Pendidikan Multikultural: Sebuah Perspektif Global. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(6), 5143–5149. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i6.1649>.
- Danoebroto, S. W. (2012). Model Pembelajaran Matematika Berbasis Pendidikan Multikultural. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 1(1), 94–107.

- 1525 *Pendidikan Demokrasi dan Pendidikan Multikultural: Tinjauan Praktis di Sekolah Menengah Pertama - Daffa Fakhri Maulana, Dian Azizah Wijaya, Danang Ade Agustinova, Suharno*
DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i2.6458>
<https://doi.org/10.21831/Jppfa.V1i1.1054>
- Doll, R. C. (1974). *Curriculum Improvement Decision Making And Process*. Allyn Bacon.
- Furqon, M. (2020). Pendidikan Multikultural Dsalam Dunia Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Nusantara: Kajian Ilmu Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.52796/Jpnu.V1i1.6>.
- Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 008/H/Kr/2022 Tentang Capaian Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Me, Pub. L. No. 008/H/Kr/2022 (2022).
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, Pub. L. No. 56/M/2022 (2022).
- Miles, B. M., Micheal, A. H., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis. A Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- Muchtar, S, A. (2001). *Pendidikan Dan Masalah Sosial Budaya*. Gelar Pustaka Mandiri.
- Nanggala, A. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Multikultural. *Jurnal Soshum Insentif*, 3(2), 197–210. <https://doi.org/10.36787/Isi.V3i2.354>.
- Nurhidayah, S., Rahmawati, A., & Saputra, D. S. (2022). Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal. *Journal Of Innovation In Primary Education*, 2(2), 33–39. <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jipe/article/view/2788>.
- Palipung, N. (2016). Implementasi Pendidikan Multikultural Di Sekolah Inklusi Sd Taman Muda Ibu Pawiyatan Taman Siswa Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 5(5), 558–566. <https://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/sakp/article/view/5320>.
- Rosyada, D. (2014). Pendidikan Multikultural Di Indonesia Sebuah Pandangan Konsepsional. *Jurnal Sosio Didaktika*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.21831/Sakp.V5i5.5320>.
- Sapriya. (2009). *Pendidikan Ips Konsep Dan Pembelajaran*. Pt Remaja Rosdakarya.
- Sipuan, S., Warsah, I., Amin, A., & Adisel, A. (2022). Pendekatan Pendidikan Multikultural. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(2), 815. <https://doi.org/10.37905/Aksara.8.2.815-830.2022>.
- Sobri, M., & Umar. (2022). Implementasi Pendidikan Demokrasi Di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(4), 6174–6181. <https://doi.org/10.31004/Jpdk.V4i4.6362>.
- Suharno. (2016). *Membangun Kebangsaan Multikultural: Teoritis, Praktis, Dan Konteks Pengembangannya*. Diandra Pustaka Indonesia.
- Sulistyobudi, N. Dkk. (2014). *Implementasi Pendidikan Multikultural Di Sma Daerah Istimewa Yogyakarta*. Balai Pelestarian Nilai Budaya (Bpnb) Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Sunarto, K. (2004). *Multicultural Education In Schools, Challenges In Its Implementation: Stepping Into The Unfamiliar*. Jurnal Antropologi Indonesia.
- Supriatin, A., & Nasution, A. R. (2017). Implementasi Pendidikan Multikultural Dalam Praktik Pendidikan Di Indonesia. *Elemntary*, 3(1), 1–13. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/Elementary/article/view/785>.
- Sutisnawati, A., Maksum, A., & Marini, A. (2023). Mplementasi Pendidikan Multikultural Berbasis Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila P5 Di Sekolah Dasar. *Dwija Cendekia: Jurnal Riset Pedagogik*, 7(3), 1057–1069. <https://doi.org/10.20961/Jdc.V7i3.79769>.
- Tilaar, H. A. . (2002). *Perubahan Sosial Dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif Untuk Indonesia*. Grasindo.

- 1526 *Pendidikan Demokrasi dan Pendidikan Multikultural: Tinjauan Praktis di Sekolah Menengah Pertama - Daffa Fakhri Maulana, Dian Azizah Wijaya, Danang Ade Agustinova, Suharno*
DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i2.6458>
- Wales, R. (2022). Pendidikan Multikultural Di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, Dan Sosial Humaniora*, 1(1), 1–25. <https://Journal.Forikami.Com/Index.Php/Nusantara/Article/View/62>.
- Wibowo, A. M. (2015). *Pendidikan Multikultural Di Pulau Dewata, Sebuah Bunga Rampai Tentang Pendidikan Multikultural Pada Sma Di Provinsi Bali*. Cv Arti Bumi Intaran.
- Wibowo, A. P., & Wahono, M. (2017). Pendidikan Kewarganegaraan: Usaha Konkret Memperkuat Multikulturalisme Di Indonesia. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 196–205. <https://doi.org/10.21831/Civics.V14i2.16043>.
- Widiyanto, D., & Istiqomah, A. (2023). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi. *Jurnal Pendidikan*, 32(1). <https://journal.univetbantara.ac.id/index.php/jp/article/view/2826>.
- Winarno. (2007). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan (Edisi Kedua)*. Pt. Bumi Aksara.
- Winataputra, U. S., & Budimansyah, D. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Internasional: Konteks, Teori Dan Profil Pembelajaran*. Widja Aksara Press.
- Yaqin, M, A. (2007). *Pendidikan Multikultural: Cross Cultural Understanding Untuk Demokrasi Dan Keadilan*. Pilar Media.